

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni berdasarkan subjektifitas yang tertuang dari hasil pengalaman dan budaya yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat. Keinginan pribadi dan kehendak pribadi masih dikesampingkan dibandingkan dengan faktor eksternal yakni kebijakan Sultan atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara wilayah *Urban*, *Sub-Urban* dan *Rural* sehingga keberagaman persepsi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tergolong cukup tinggi, wilayah *Rural* memiliki Nilai rata-rata Skala Indeks 3.05 masuk kedalam kateogri Cukup Baik, berbeda dengan wilayah *Urban* yang memiliki nilai rata-rata Indeks 3.61 dan masuk kedalam kategori Baik dan wilayah *Sub-Urban* yang masuk kedalam kategori Cukup Baik dengan nilai rata-rata Indeksnya adalah 3.40.
3. Nilai rata-rata dari hasil perhitungan 12 pernyataan yang menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori Cukup Baik. Hal ini pun terbukti dengan total rata-rata indeks yakni 3.18 masuk dalam kriteria Cukup Baik.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berdasarkan hanya pada asas dan kewenangan yang mutlak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara, melainkan lebih dari itu proses penetapan secara prosedural yang sistematis perlu juga untuk melihat pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi keputusan tidak diambil atas dasar hanya kewenangan secara formil namun juga melibatkan pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan dan mengawasi secara langsung proses pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi pun harus ditingkatkan agar tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat lebih menyeluruh. Dan perlu kiranya diadakan penelitian terkait dengan efektifitas sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi agar bisa mengukur tingkat keberhasilan MK dalam mensosialisasikan setiap Putusan.
3. Dalam menjalankan setiap kewenangan dan juga keputusan terkait dengan proses persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintahan Daerah atau secara khusus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus melihat keinginan dan kehendak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Intinya pemerintah harus lebih dekat dan lebih lagi mengayomi dalam hal perumusan kebijakan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur.